

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Padi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas ini telah turut mempengaruhi tatanan politik dan stabilitas nasional. Selain sebagai makanan pokok lebih dari 95 % penduduk, padi juga telah menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar petani dipedesaan. Dewasa ini usahatani padi mampu menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani. Usahatani padi di Indonesia berkembang dari pertanian subsisten yang semula hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga menjadi usahatani komersial. Perubahan paradigma ini dipicu oleh pergeseran ekonomi dan kemajuan teknologi pertanian. Akan tetapi, usahatani yang telah terlanjur terbelenggu dalam pertanian subsisten belum mampu memberikan nilai tambah yang layak bagi keluarga petani, meskipun secara keseluruhan produksi padi telah memberikan kontribusi lebih dari Rp. 120 triliun bagi perekonomian nasional (Departemen Pertanian, 2008:1).

Prioritas pembangunan pertanian dewasa ini adalah melestarikan swasembada pangan, peningkatan ekspor non migas dan mengurangi pengeluaran devisa yang sekaligus memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Olehnya itu, pengembangan wilayah pedesaan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian maka sangat diharapkan perkembangan agribisnis daerah khususnya padi yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah (Satoto dkk., 2013: 1).

Besar kecilnya kontribusi usahatani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas penguasaan lahan. Implikasinya, kebijakan dibidang usahatani padi lebih banyak dinikmati oleh petani dengan skala usaha yang luas. Berbeda dengan padi, usahatani non padi nampaknya kontribusi berbanding terbalik dengan luas penguasaan lahan. Dalam jangka panjang, luas kepemilikan lahan oleh petani cenderung berkurang karena makin banyaknya jumlah penduduk dan pragmentasi lahan sulit dihindari. Jika dipedesaan tidak tersedia lapangan

kerja diluar usahatani, kondisi perekonomian masyarakat pedesaan akan menurun(Departemen Pertanian, 2008: 8).

Kabupaten Bone Bolango, lahan pertaniannya merupakan salah satu modal dalam usaha dibidang pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Tahun 2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil Sensus Tahun 2003. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian hasil Sensus Tahun 2013 adalah 6.186,34m<sup>2</sup>, naik sebesar 52.62% dibandingkan hasil Sensus Tahun 2003 yang tercatat sebesar 16.543m<sup>2</sup>. Dari rata-rata total luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian, sebagian besar menguasai lahan pertanian, dari hasil Sensus Tahun 2013 tercatat rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian sebesar 5.800m<sup>2</sup>, dimana sebagian besar lahan pertanian yang dikuasai tersebut bukan sawah. Total rata-rata luas lahan pertanian bukan swah yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian mencapai 5.057m<sup>2</sup> atau mencapai 87,20% total rata-rata lahan pertanian yang dikuasai. Rata-rata luas lahan pertanian yang paling besar yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian ada di Kecamatan Bulango Ulu (15,56 ribu m<sup>2</sup>) sementara untuk rata-rata penguasaanlahan bukan pertanian oleh rumah tangga usaha pertanian hanya sebesar 385,94m<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Bone Bolango, 2013).

Kecamatan Kabila adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar petaninya adalah berusaha tani tanaman padi, berdasarkan data sekunder tahun 2014 luas sawah di Kecamatan Kabila adalah 540 hektar dengan produksi sebesar 6.171,2 ton dan untuk produktivitas sebesar 56,00 kwintal/ha (BPS Kecamatan Kabila, 2014).

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan pada petani padi sawah diperoleh bahwa sebagian besar untuk petani padi sawah adalah penggarap dan sisanya pemilik dan pemilik penggarap. Hal ini menjadi alasan dilakukan penelitian yang diformulasikan pada judul “Penguatan kelembagaan kelompok tani padi sawah pada penerapan sistem tanam legowo dan dampaknya di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan kelembagaan kelompok tani dalam penerapan sistem tanam legowo di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone bolango.
2. Bagaimana dampak penerapan sistem tanam legowo terhadap produksi petani di Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan untuk penelitian adalah, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam penerapan sistem tanam legowo di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
2. Bagaimana dampak penerapan sistem tanam legowo terhadap produksi dan pendapatan petani di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat untuk penelitian ini adalah :

1. Diharapkan bagi peneliti dapat meningkatkan daya saing dalam komoditas padi sehingga dapat memperoleh nilai produksi pertanian dan dengan data yang diperoleh kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam membudidayakan tanaman pertanian khususnya padi, sehingga menjadi tolak ukur dalam penelitian selanjutnya.
2. Menambah wawasan pengetahuan mengenai cara mengembangkan tanaman padi agar bisa mendapatkan suatu penghasilan yang baik.
3. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam mengkaji dan memecahkan masalah yang dihadapi.